

Judul : Minim jalur komunikasi, BPKS Aceh seolah berjalan sendirian
Tanggal : Sabtu, 20 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Minim Jalur Komunikasi

BPKS Aceh Seolah Berjalan Sendirian

ANGGOTA Komisi VI DPR Nasim Khan meminta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) berkontribusi pada perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Peran BPKS mesti diperkuat agar dapat tampil sebagai aktor penting dalam meningkatkan ekonomi di Bumi Serambi Mekkah.

Menurut Nasim, BPKS harus mendapat perhatian lebih, baik dari legislatif maupun eksekutif, termasuk Presiden, Badan Anggaran DPR, dan lembaga terkait lainnya. Tanpa dukungan tersebut, cita-cita meningkatkan perekonomian Aceh sulit tercapai.

Selain itu, BPKS juga dinilai tidak memiliki jalur komunikasi nasional yang jelas, sehingga seolah berjalan sendiri tanpa wadah koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini berbeda dengan kawasan perdagangan bebas lain, seperti Batam, yang sudah memiliki mekanisme koordinasi terstruktur.

"Komisi VI akan mengupayakan sinergi lintas pihak demi terwujudnya BPKS yang kuat. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh kerja sama semua pihak sesuai tanggung jawabnya," ujar anggota Fraksi PKB itu, Kamis (18/9/2025).

Senada, anggota Komisi VI DPR Askweni menegaskan, kemajuan Aceh adalah tang-

gung jawab bersama legislatif dan eksekutif. BPKS memang mitra kerja Komisi VI, tetapi kementerian dan lembaga lain juga harus terlibat untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh.

"Berdasarkan data BPS, Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sinergi antara sektor swasta dan Pemerintah. Komisi VI akan membangun jembatan komunikasi antar pihak agar ekonomi Aceh bisa bangkit," kata politikus PKS itu.

Askweni juga menekankan pentingnya pengelolaan gas alam Aceh yang potensial. Kekayaan energi Aceh harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung transisi energi baru terbarukan yang saat ini tengah diminati investor asing.

"Pusat harus memberdayakan Pemerintah Daerah dan masyarakat agar bisa menikmati potensi yang dimiliki. Dengan dukungan regulasi yang ramah investasi, iklim usaha di Aceh akan semakin menarik," ujarnya.

Askweni menambahkan, Aceh memiliki nilai tambah lain berupa tingkat kriminalitas yang relatif rendah. Hal ini seharusnya menjadi daya tawar bagi investor. Namun, rendahnya serapan investasi menunjukkan regulasi yang ada masih belum bersahabat. ■ **PVB**